

BAB III

PERMASALAHAN ORGANISASI

3.1 Analisa Pelaporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

3.1.1 Pelaporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

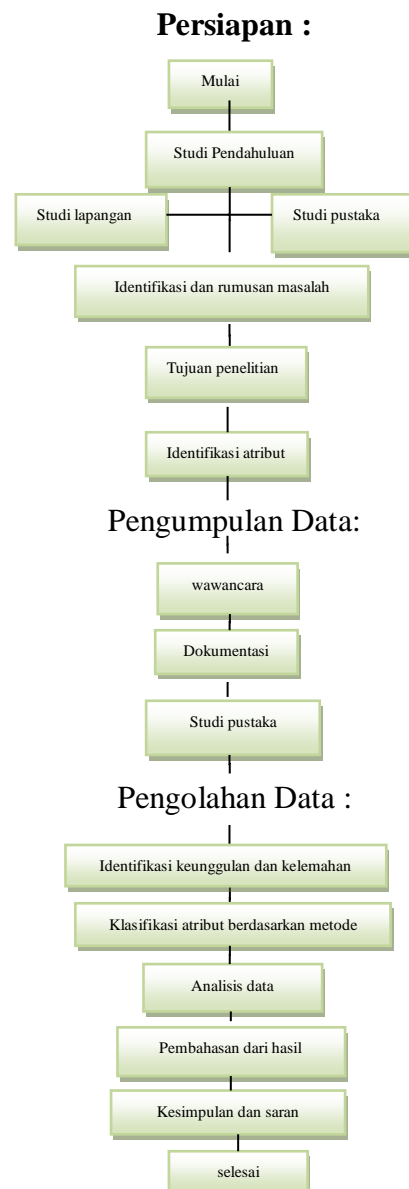
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sangat minim, akibatnya laporan yang dibuat cenderung kurang efisien. Disamping itu masalah sumber daya manusia menjadi hal dominan yang perlu dibenahi, mengingat kompetensi para pelaksana keuangan daerah yang belum tersosialisasi secara luas tentang penyusunan APBD berbasis kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan keuangan daerah yang lebih transparan.

3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah pelaporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah



3.2 LANDASAN TEORI

3.2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses untuk melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Nordiawan (2006), menyebutkan :Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Hafiz (2006), yang mendefenisikan akuntansi keuangan daerah sebagai Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi keuangan daerah mengacu pada penerapan teori prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

3.2.2 Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan merupakan proses akuntansi untuk melakukan penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi baik transaksi internal maupun transaksi eksternal ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus dan mempostingnya ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Menurut Simamora (2004), “Pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi, terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur”. Pencatatan juga diartikan sebagai “Suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seram terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Mulyadi (2008).

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi, pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2008), “Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*”. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusun laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit di kontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan

tersebut.

Sistem pencatatan *double entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang dicetuskan oleh Luca Pacioli dalam artikelnya yang berjudul “*Summa arithmetica geometria pro portionet propotionalita.*” Kusnadi (2001). Sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi dicatat dua kali, sehingga membentuk perkiraan dalam dua sisi berlawanan yaitu sisi debit dan kredit secara berpasangan. Menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Halim (2004). *Double entry accounting* dapat menyediakan pencatatan yang akurat seperti yang diungkapkan oleh Keiso dan Weygandt (2001) : *Under the universally used double entry system, the dual (two sides) affect of each transaction is recorded in appropriate account. This system providers a logical method for recording transaction. It also offer a mean if proving the accuracy of the recorded amounts. If every transactions recorded with equal debits and credits, then the sum of all the debits to the accountants must equal the sum of all the credits.*

Dengan digunakannya *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check*. Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, *double entry accounting* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) maupun bagian keuangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga

mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

3.2.3 Pengakuan Akuntansi

Pengakuan akuntansi merupakan penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi. Menurut Partomo (2001), Sistem/basis/dasar pencatatan adalah himpunan-himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja (*expenditure*). Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Selain itu, juga dikenal basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*). Beberapa orang berpendapat bahwa secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas dan basis akrual.

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda penerapannya, untuk sektor publik terdiri atas :

1. Basis Kas (*cash basis*)
2. Basis Akrual (*accrual basis*)
3. Basis Kas Modifikasi (*modified cash basis*)
4. Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basis*)

Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan cash basis masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dipermasalahkan meskipun secara tertulis banyak mengandung kelemahan. Kusnadi (2001). Adapun karakteristik kas basis (*cash basis*) adalah mengukur aliran dari sumber kas,

transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima ataupun dibayarkan, menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lain, menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian (2002).

Menurut Kartadinata (2006), Perencanaan merupakan sesuatu yang mendasar dalam proses manajemen. Perencanaan suatu proses yang akan membuat perusahaan peka dalam pengertian mampu menyesuaikan diri, terhadap ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan yang ada. Menurut Mardiasmo (2009) Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang akan dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

3.2.4 Siklus Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Menurut Soemarso (2004), “siklus akuntansi akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan maulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan hingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara terus menerus.

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang

telah dijelaskan di atas, perbedaannya adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah, laporan aliran kas dan neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian, setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan keuangan tersebut.

Menurut Bastian (2007) mengatakan bahwa “Siklus akuntansi keuangan daerah merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.” Dengan demikian, siklus akuntansi keuangan daerah merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam sistem akuntansi. Sesuai dengan pendapat Halim (2007), menyatakan bahwa “Siklus akuntansi keuangan daerah adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (pasal 265) menyebutkan “Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

“Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.” (PP No. 24 Tahun 2005). Dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD dan

sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari : pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan SKPD pada tanggal tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.”

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4. Menyusun Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan saldo nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya, sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, jurnal penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah yang benar.

3.3 Rancangan Analisa Pelaporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

3.3.1 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

3.3.2 Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan keuangan 2017, 2018 dan 2019, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan selama 2 tahun untuk tahun 2017 dan 2018.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Observasi, wawancara dan riset pustaka. Observasi dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung pihak-pihak terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran guna pengumpulan data yang diperlukan. Sedangkan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu mendeskripsikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran dan kesesuaiannya dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis deskriptif ini memaparkan semua hasil penelitian berdasarkan hasil riset lapangan dan riset pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

